

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abd Thalib, H., & Aisyah, N. T. (2024). *Hukum perjanjian*. Rajawali Pers.
- Agusmidah, Wijayanti, A., & Shalihah, F. (2020). *Pelindungan pekerja migran Indonesia berdasarkan UU No. 18 Tahun 2017*. Yayasan Al-Hayat.
- Asshiddiqie, J. (2017). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.
- Badriyah, S. M. (2019). *Aspek hukum perjanjian franchise*. CV Tiga Pratama.
- Badruzaman, M. D. (1981). *Pembentukan hukum nasional dan permasalahannya*. Alumni.
- Busro, A. (2012). *Hukum perikatan berdasar Buku III KUHPerdara*. Pohon Cahaya.
- Hamid, A. (2018). *Menuju kebijakan yang adil bagi pekerja migran*. FHUP Press.
- Hamid, A. (2019). *Kebijakan ketenagakerjaan bagi pekerja migran*. Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
- Harahap, M. Y. (1982). *Segi-segi hukum kontrak*. Alumni.
- Hernoko, A. Y. (2011). *Hukum perjanjian: Asas proporsionalitas dalam kontrak komersial*. Kencana.
- Ishaq. (2017). *Metode penelitian hukum dan penulisan skripsi, tesis, serta disertasi*. Alfabeta.
- Kartikawati, D. R. (2019). *Hukum kontrak*. Universitas Krisnadwipayana.
- Khairandy, R. (2004). *Itikad baik dalam kebebasan berkontrak*. Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia.
- Khakim, A. (2020). *Pengantar hukum ketenagakerjaan Indonesia*. Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Kencana.
- Miru, A. (2011). *Hukum kontrak dan perancangan kontrak*. Rajawali Pers.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Citra Aditya Bakti.
- Nugroho, S. S. (n.d.). *Hukum kontrak dan perkembangannya*. Universitas Merdeka Madiun.
- Poole, J. (2016). *Textbook on contract law*. Oxford University Press.
- Salim, H. S. (2019). *Hukum kontrak: Teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika.
- Sjahdeini, S. R. (1993). *Kebebasan berkontrak dan perlindungan yang seimbang bagi para pihak*. Pustaka Utama Grafiti.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar penelitian hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2014). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT RajaGrafindo Persada.
- Soeroso, R. (2010). *Perjanjian di bawah tangan*. Sinar Grafika.
- Stewart, A., Swain, W., & Fairweather, K. (2019). *Contract law: Principles and context*. Cambridge University Press.
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2017). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Balai Pustaka.

Jurnal :

- Andika, E. (2015). Keabsahan perjanjian baku dalam perjanjian kredit bank dihubungkan dengan asas kebebasan berkontrak. *Lex Privatum*, 3(2), 1–8.
- Badriyah, S. M. (2011). Perlindungan hukum dalam kontrak standar. *Masalah-Masalah Hukum*, 40(3).

Daud, S. M. (2021). Hukum objek dan kausa dalam perjanjian. *Journal Islam & Contemporary Issues*, 1(1), 59–64.

Hernoko, A. Y. (2013). Asas proporsionalitas dalam kontrak. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 20(2).

Khairandy, R. (2003). Perjanjian baku dan perlindungan pihak yang lemah. *Jurnal Hukum Bisnis*, 22(1).

Malohing, Y. (2017). Kedudukan perjanjian baku kaitannya dengan asas kebebasan berkontrak. *Lex Privatum*, 5(4), 5–6.

Salim, H. S. (2015). Perkembangan asas keadilan dalam hukum kontrak Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 4(2).

Sarjana, I. M. (2016). Pembatasan klausula eksonerasi. *Jurnal Notariil*, 1(1), 109–110.

Suradi, & Utama, B. R. (2022). Aspek hukum penerapan perjanjian baku. *Law, Development & Justice Review*, 5(1), 46.

WN, S. F., Hayatinnufus, M. A., Listyani, N. C., & Suyatna, R. G. (2025). Asas-asas utama dalam perjanjian. *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, 2(1), 294. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.482>

Bahan Ajar:

Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. (2023). *Panduan tugas akhir – penulisan hukum*. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah. (2019). *Perjanjian menurut KUHPerdata*

Universitas Diponegoro. (2025). *Bab II tinjauan pustaka*. <https://eprints.undip.ac.id>

Laman :

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. (2024). *Laporan data penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia tahun 2023*. <https://www.bp2mi.go.id>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Pembahasan RUU pelindungan pekerja migran Indonesia*. <https://jdih.dpr.go.id>

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. (2023). *Pembahasan RUU pelindungan pekerja migran Indonesia: Perketat pengawasan perusahaan penyalur PMI*. <https://jdih.dpr.go.id/berita/detail/id/59199>

Hukumonline. (2024, August 30). *Macam-macam subjek hukum*. <https://www.hukumonline.com>

Kementerian Koordinator Bidang PMK. (2022, November 24). *Pemerintah upayakan biaya penempatan tidak membebani pekerja migran*. <https://www.kemenkopmk.go.id>

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Memorandum Saling Pengertian antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Malaysia tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Sektor Domestik Tahun 2022;

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

Peraturan Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Kepala BP2MI Nomor 17 Tahun 2025 tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Keputusan Kepala BP2MI Nomor 603 Tahun 2023;

Putusan Mahkamah Agung Nomor 1904 K/Sip/1982; dan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 3431 K/Pdt/1985.

Wawancara :

Fora. (2025, December 31). Wawancara Pekerja Migran Indonesia. Bogor.

NR. (2026, January 11). Wawancara Pekerja Migran Indonesia. Bogor.

Rinto Srimulyono. (2025, November 21). Wawancara Ketua Tim Penempatan BP2MI. Semarang.

Sarah. (2026, January 21). Wawancara HRD PT Maharani Tri Utama Mandiri (P3MI). Bogor.